



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI V DPR RI

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

Tahun Sidang	: 2019 – 2020
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke -9
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 20 November 2019
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.55 WIB s.d 13.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: Membahas pembiayaan dan kesiapan infrastruktur rencana pemindahan Ibu Kota Negara
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: 41 dari 52 orang Anggota Komisi V DPR RI
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas pada hari ini adalah membahas mengenai pembiayaan dan kesiapan infrastruktur Rencana Pemindahan Ibukota Negara.
3. Ketua Rapat mempersilakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:

1. Komisi V DPR RI memahami penjelasan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Perhubungan tentang pembiayaan dan kesiapan infrastruktur rencana pemindahan ibukota negara. Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan untuk melanjutkan kajian tentang tahap-tahap rencana pengembangan infrastruktur di Ibukota baru maupun skema pembiayaan yang akan dipergunakan secara lebih detail.
2. Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan agar dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan transportasi Ibu Kota Negara dilakukan setelah ditetapkannya Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang baru.
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan agar pemindahan Ibukota tetap memperhatikan kearifan lokal dan daerah penyangganya.
4. Komisi V DPR RI akan mengagendakan rapat dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Kementerian Perhubungan dalam rangka pembahasan lebih lanjut terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.30 WIB.


Jakarta, 20 November 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BAPPENAS**



SUHARSO MONOARFA

SEKJEN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN



DJOKO SASONO

KETUA RAPAT,



LASARUS

DIRJEN CIPTA KARYA



DANIS H. SUMADILAGA